

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Ahmad Ali dan Wiwie Heryani, *Asas-Asas Hukum Pembuktian Perdata*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2012)
- Aria Zurnetti, *et.al*, *Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia* (Depok: Rajawali Pers, 2021)
- Beni Murdani, *Pajak & Kepastian Hukum (Filosofis, Teoritis, Praktis) Pendekatan Undang-Undang, Pendekatan Kasus, Interpretasi Hukum & Analysis Economic of Law*, (Makassar: PT. Nas Media Indonesia, 2024)
- Eddy Marek Leks, *Norma Hukum Yang Tidak Adil: Suatu Tanggapan Kritis Terhadap Diskursus Antara John Finnis Dan Robert Alexy*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2022)
- Emilia Susanti dan Eko Rahardjo, *Hukum Dan Kriminologi*, (Bandar Lampung: AURA, 2018)
- Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan, *Kewajiban Membuktikan Dokumen Penghadap Dan Jerat Pasal 55 KUHP*, (Tangerang: Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan, 2019).
- Gatot Efrianto dan Danu Rahaman, *Tindak Pidana Pemalsuan Dalam Akta Otentik*, (Malang: PT. Literasi Nusantara Abadi Grup, 2024)
- Ghansam Anand, *Karakteristik Jabatan Notaris Di Indonesia*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2018)
- H. Dhoni Martien, *Politik Hukum Kenotariatan*, (Makassar: Mitra Ilmu, 2023)
- Habib Adjie, *Kebatalan Dan Pembatalan Akta Notaris*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2011)
- Habib Adjie, *Meneropong Khazanah Notaris Dan PPAT Indonesia (Kumpulan Tulisan Tentang Notaris Dan PPAT)*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2009)
- Habib Adjie, *Merajut Pemikiran Dalam Dunia Notaris & PPAT*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2014)
- Habib Adjie, *Pemahaman: Awal (Komparisi – Premisse), Isi, dan Akhir Akta Notaris*, (Surabaya: Narotama University Press, 2020)

- Habib Adjie, *Sanksi Perdata Dan Administratif Terhadap Notaris Sebagai Pejabat Publik*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2008)
- Harrys Pratama Teguh, *Hukum Pidana Jabatan Dan Siber Untuk Notaris*, (Yogyakarta: Pohon Cahaya Semesta, 2024)
- Hermin, *Regulasi Penandatanganan Secara Elektronik Atas Akta Autentik*, (Ponorogo: Uwais Inspirasi Indonesia, 2024)
- I Gusti Kade Budhi H., *Filsafat Hukum*, (Depok: Rajawali Pers, 2021)
- I Made Hendra Kusuma, *Problematisasi Notaris Dalam Praktik (Kumpulan Makalah)*, (Bandung: P.T. Alumni, 2019)
- Ilham Dwi Rafiqi, *Pengembangan Hukum Profetik Dalam Putusan Hakim Perkara Lingkungan Hidup*, (Malang: Penerbit Universitas Muhammadiyah Malang, 2024)
- Jonaedi Effendi, *et.al, Kamus Istilah Hukum Populer*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2018)
- Keputusan Dekan Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan Nomor: 001/SKD/FH-UPH/I/2025 tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) Penulisan Tugas Akhir Tesis Pada Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan, (Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan, 2025)
- Kholidah, *et.al, Notaris dan PPAT di Indonesia: Aplikasi Teori dan Praktik Dalam Pembuatan Akta*, (Yogyakarta: Semesta Aksara, 2023)
- Kurniawan Tri Wibowo dan Alif Ridwan Pramana Putra, *Obstruction Of Justice vs Perlindungan Hukum Terhadap Notaris*, (Jakarta: PT Cipta Gadhing Artha, 2021)
- Lonna Yohanes Lengkong, *Penerapan Asas Mencari Kebenaran Materiil Dalam Hukum Acara Perdata*, (Jakarta: UKI Press, 2019)
- M. Adystia Sunggara, *et.al, Penemuan dan Penafsiran Hukum*, (Jakarta: Publica Indonesia Utama, 2023)
- Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011)
- Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram: Mataram University Press, 2020)
- Mustafa, *Metodologi Penelitian Hukum “Aplikasi Teknologi dan Pendekatan Multidisiplin”*, (Purbalingga: Eureka Media Aksara, 2024)
- Nadhif M. Alkatiri dan Kanti Rahayu – Sanusi, *Perbandingan Tugas Dan Wewenang Notaris Indonesia Dan Amerika Serikat*, (Yogyakarta: Tanah Air Beta, 2021)

- Nur Solikin, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*, (Pasuruan: CV. Penerbit Qiara Media, 2021)
- Oemar Moechtar, *Hukum Kenotariatan: Teknik Pembuatan Akta Notaris Dan PPAT*, (Jakarta: Kencana, 2024)
- P.A.F. Lamintang dan Franciscus Theojunior Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014)
- P.N.H. Simanjuntak, *Hukum Perdata Indonesia*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2015)
- Rafika Nur, *et.al, Sistem Peradilan Pidana*, (Gorontalo: Penerbit CV. Cahaya Arsh Publisher & Printing, 2022)
- Rahmadi, *Pengantar Metodologi Penelitian*, (Banjarmasin: Antasari Press, 2011)
- Rosjidi Ranggawidjaja, *Pengantar Ilmu Perundang-Undangan Indonesia*, (Bandung: Mandar Maju, 1998)
- Roulinta Y Sinaga, *et.al, Hukum Kontrak*, (Padang: CV. Gita Lentera, 2023)
- Rudy Haposan Siahaan, *et.al, Hukum Kenotariatan Indonesia Jilid 1*, (Bandung: Media Sains Indonesia, 2022)
- Rusdianto Sesung, *et.al, Hukum Dan Politik Hukum Jabatan Notaris*, (Surabaya: R.A.De.Rozarie, 2017)
- Selfianus Laritmas dan Ahmad Rosidi, *Teori-Teori Negara Hukum Perspektif Kewenangan Mahkamah Agung Dalam Melakukan Pengujian Peraturan Perundang-Undangan di Bawah Undang-Undang*, (Jakarta: Kencana, 2024)
- Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia Edisi Ketujuh*, (Yogyakarta: Liberty Yogyakarta, 2006)
- Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, (Yogyakarta: Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2010)
- Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Sebuah Pengantar*, (Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2010)
- Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*, (Yogyakarta: Liberty, 1996)
- Yati Nurhayati, *Buku Ajar Pengantar Ilmu Hukum*, (Bandung: Penerbit Nusa Media, 2020)
- Yenny Febrianti, *Keberadaan Hukum Kenotariatan Di Indonesia*, (Cirebon: CV. Green Publisher Indonesia, 2023)

JURNAL

- Acep Cahyadi dan Ibnu Artadi, "Implementasi Penyidikan Terhadap Notaris Yang Melakukan Tindak Pidana Di Kabupaten Tasikmalaya", *Hukum Responsif*, Vol. 9, No. 1, 2018. DOI: <https://doi.org/10.33603/responsif.v9i1.5035>
- Aditya Salsabila Consoleo, *et.al*, "Tanggung Jawab Notaris Terhadap Keabsahan Identitas Penghadap Dalam Pembuatan Akta Pengakuan Hutang Dan Kuasa Jual", *JURNAL HAK: Kajian Ilmu Hukum, Administrasi dan Komunikasi*, Vol. 1, No. 1, 2023. DOI: <https://doi.org/10.10.30656/jhak.v1i1.7443>
- Agus Budianto, *et.al*, "Obligation to Prove Appearer Document Authenticity as Deelneming Claim Exception", *Journal of Advanced Research in Law and Economics*, Vol. 11, No. 3, 2020. DOI: [https://doi.org/10.14505/jarle.v11.3\(49\).08](https://doi.org/10.14505/jarle.v11.3(49).08)
- Agus Wijayanto, "Perlindungan Hukum Terhadap Kriminalisasi Notaris Dalam Menjalankan Tugas Dan Fungsinya Sebagai Pejabat Umum Berdasarkan Undang Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris", *Jurnal Akta*, Vol. 4, No. 4, 2017. DOI: <http://dx.doi.org/10.30659/akta.v4i4.2620>
- Andi Pranoto dan Mohamad Fajri Mekka Putra, "Notaris Dalam Suatu Peran Serta Perlindungan Hukumnya", *Jurnal Kertha Semaya*, Vol. 10, No. 11, 2022. DOI: <https://doi.org/10.24843/KS.2022.v10.i11.p04>
- Annisa Hanifah, *et.al*, "Urgensi Pengaturan Perusahaan Gadai Swasta Dengan Sistem Online", *Al-Mustashfa: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Islam*, Vol. 3, No. 1, 2018, hal. 32. DOI: [10.24235/jm.v3i1.2935](https://doi.org/10.24235/jm.v3i1.2935)
- Hernawati RAS dan Joko Trio Suroso, "Kepastian Hukum Dalam Hukum Investasi Di Indonesia Melalui Omnibus Law", *Jurnal Ilmiah MEA (Manajemen, Ekonomi, dan Akuntansi)*, Vol. 4, No. 1, 2020. DOI: <https://doi.org/10.31955/mea.v4i1.557>
- I Nyoman Wira Candra, *et.al*, "Bentuk Pelanggaran Hukum Dan Penegakan Hukum Notaris Di Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat", *Jurnal Risalah Kenotariatan*, Vol. 4, No. 1, 2023. DOI: <https://doi.org/10.29303/risalahkenotariatan.v4i1.100>
- Lutfi Effendi dan Zainal Arifin Hoesein, "Kekosongan Hukum Terhadap Batas Waktu Kewenangan Setelah Masa Jabatan Notaris Berakhir", *Jurnal Retentum*, Vol. 07, No. 01, 2025. DOI: <https://doi.org/10.46930/retentum.v7i1.5279>

- Mario Julyano dan Aditya Yuli Sulistyawan, “Pemahaman Terhadap Asas Kepastian Hukum Melalui Konstruksi Penalaran Positivisme Hukum”, Jurnal CREPIDO, Vol, 1, No. 1, 2019. DOI: <https://doi.org/10.14710/crepido.1.1.13-22>
- Marvin dan Pieter Latumeten, “Perlindungan Notaris Melalui Akta Yang Dibuatnya Terhadap Kemungkinan Sengketa Dikemudian Hari”, Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan (JISIP), Vol. 6, No. 3, 2022. DOI: 10.36312/jisip.v6i3.3314/<http://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JISIP/index>
- Miftahul Huda, “Hak Atas Memperoleh Kepastian Hukum Dalam Perspektif Persaingan Usaha Melalui Telaah Bukti Tidak Langsung (The Right To Obtain A Legal Certainty In Business Competition, In Perspective Through The Circumstantial Evidence)”, Jurnal HAM, Vol. 11, No. 2, 2020. DOI: <http://dx.doi.org/10.30641/ham.2020.11.255-267>
- Nabiella Putri Nastiti, *et.al*, “Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kerja Anak Ditinjau Dari Undang-Undang No. 13 Tahun 2004 Tentang Ketenagakerjaan”, Jurnal Hukum dan Sosial Politik, Vol. 1, No. 3, 2023. DOI: <https://doi.org/10.59581/jhsp-widyakarya.v1i3.626>
- Putra Halomoan Hasibuan, “Proses Penemuan Hukum”, Yurisprudentia: Jurnal Hukum Ekonomi, Vol. 2, No. 2, 2016. DOI: [10.24952/yurisprudentia.v2i2.673](https://doi.org/10.24952/yurisprudentia.v2i2.673)
- Roni Andriyanto, *et.al*, “Kepastian Hukum Prosedur Penggantian Kerugian Pemegang Hak Atas Tanah Yang Terdampak Proyek Jalan Tol”, Journal Of Legal Research, Vol. 4, No. 5, 2022. DOI: 10.15408/jlr.v4i5.28921
- Solechan, “Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik Dalam Pelayanan Publik”, Administrative Law & Governance Journal, Vol. 2, No. 3, 2019. DOI: <https://doi.org/10.14710/alj.v2i3.541-557>
- Zainal Arifin Hoesein, “Pembentukan Hukum Dalam Perspektif Pembaharuan Hukum”, Jurnal RechtsVinding, Vol. 1, No. 3, 2012. DOI: [10.33331/rechtsvinding.v1i3.87](https://doi.org/10.33331/rechtsvinding.v1i3.87)

HASIL PENELITIAN

- Lintang Cahyani Andira, “Kewenangan Notaris Sebagai Otoritas Pendaftaran Dalam Penyelenggaraan Sertifikasi Elektronik”. Tesis, Jember: Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Jember, 2024

Taufik, “Hak Imunitas Terhadap Notaris Dalam Menjalankan Tugas Dan Tanggungjawab Yang Tidak Dibebankan Mencari Kebenaran Materiil”. Tesis, Yogyakarta: Program Studi Kenotariatan Program Magister Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, 2022

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Lembaran Negara Republik Indonesia, No. 75, 1959)

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Staatsblad Tahun 1847 Nomor 23)

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4432)

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5491)

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038)

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601)

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234)

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398)

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801)

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568)

Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 383, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5650)

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6137)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6396)

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 Tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 Tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6994)

Peraturan Pemerintah No 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 1997)

Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199)

Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan

Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 186)

Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No 3 Tahun 1997 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah

Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional No 5 Tahun 2017 Tentang Layanan Informasi Pertanahan Secara Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 612)

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 102 Tahun 2019 Tentang Pemberian Hak Akses Dan Pemanfaatan Data Kependudukan

PUTUSAN

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor Putusan Nomor 702K/Sip/1973

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3136 K/Pdt/1983

Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 178/Pid.B/2021/PN.JKT SEL

Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 273/1970 Perdata

Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 29/1973 Perdata

Putusan Pengadilan Negeri Sleman Nomor 336/Pid.B/2017/PN. Smn

Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 3036/Pid.B/2009/PN.Mdn

Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 82/PID/2010/PT-MDN

Putusan Mahkamah Agung Nomor 1099 K/PID/2010

Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 466/Pid.B/2023/PN.Jkt.Sel

Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 7/PID/2024/PT DKI

WEBSITE

Detik.com, “Pernyataan Lengkap Mahfud MD Minta Pertanggungjawaban Moral PSSI”, <https://sport.detik.com/sepakbola/liga-indonesia/d->

6347869/pernyataan-lengkap-mahfud-md-minta-pertanggungjawaban-moral-pssi?page=2, diakses pada 28 April 2025

Kementerian Koordinator Bidang Politik Dan Keamanan, “Laporan Tim Gabungan Independen Pencari Fakta Tragedi Stadion Kanjuruhan Malang”. <https://polkam.go.id/konten/unggahan/2022/10/LAPORAN-TGIPF-2022.pdf>, diakses pada 28 April 2025

Notary News.id, “Bincang Dinamika Hukum Dalam Praktek Notaris: “Stop Kriminalisasi Notaris!”. [Bincang Dinamika Hukum Dalam Praktek Notaris: " Stop Kriminalisasi Notaris!" - Notary News](#), diakses pada 27 April 2025

Pengurus Pusat Ikatan Notaris Indonesia, “Pemesanan Alat Pembaca KTP Elektronik”. <https://ini.id/post/pre-order-pembaca-ktp-elektronik>, diakses pada 29 April 2025

KAMUS

Kemdikbud, Kamus Besar Bahasa Indonesia Online, (Indonesia: Kemdikbud, 2016). <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/kewajiban>

Kemdikbud, Kamus Besar Bahasa Indonesia Online, (Indonesia: Kemdikbud, 2016). <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/kebenaran>

WAWANCARA

Hasil wawancara dengan Jeffri Siregar, Penyidik Pada Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya, Polda Metro Jaya, Tanggal 10 April 2025, Pukul 10.00 WIB

Hasil wawancara dengan Muhammad Anas, Penyidik Pada Direktorat Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri, Bareskrim Polri, Tanggal 11 April 2025, Pukul 10.00 WIB

Hasil wawancara dengan Pieter Latumeten, Mantan Majelis Kehormatan Pusat, Whatsapp Call, Tanggal 27 Maret 2025, Pukul 10.46 WIB

Hasil wawancara dengan Robbyson Halim, Notaris di Kota Jakarta Pusat, *Zoom Meeting*<https://us06web.zoom.us/j/86239918799?pwd=SNsYFuA18jH4zwO62mf8lfbR0lHe1W.1>, Tanggal 17 Maret 2025, Pukul 21.30 WIB

Hasil wawancara dengan Santun Sihombing, Penyidik Pada Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya, Polda Metro Jaya, Tanggal 10 April 2025, Pukul 10.00 WIB